

**BAB III  
DESKRIPSI MATA KULIAH**

**MATA KULIAH PENGEMBANGAN  
KEPRIBADIAN (MPK)**

**Mata Kuliah : Pendidikan Agama**

Kode : UNI-10108

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar : Tim MPK UNSRI

**Deskripsi :**

Pendidikan agama di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap nasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan manusia dan nasional (Kep. Dirjen Dikti No.263/Dikti/Kep/2000).

**Mata Kuliah : Bahasa Indonesia**

Kode : UNI-10308

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar : Pengajar MPK

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang pokok-pokok bahasan yang meliputi riwayat Bahasa Indonesia, sikap berbahasa lisan dan tulisan, ejaan Bahasa Indonesia, penggunaan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan 1972.

**Mata Kuliah : Pendidikan  
Kewarganegaraan**

Kode : UNI-10408

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Ruben Achmad, SH., MH

2. Hj. Mardiana, SH

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini mempelajari, memahami dan menghayati pengetahuan dan kemampuan dasar warga negara dalam hubungannya dengan negara,

termasuk hak dan kewajiban bela negara. Pendidikan kewarganegaraan meliputi kajian tentang pokok-pokok bahasan pengantar pendidikan kewarganegaraan yang mencakup hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan bela negara, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional (Kep. Dirjen Dikti No.267/Dikti/Kep/2000).

**Mata Kuliah : Bahasa Belanda**

Kode : HUK-11408

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum

2. Meria Utama, SH., LL.M

**Deskripsi:**

Para mahasiswa di semester pertama dipersiapkan untuk menguasai istilah-istilah hukum di bidang Pengantar Ilmu Hukum.

**Mata Kuliah : Bahasa Inggris 1**

Kode : HUK-11908

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar : Lembaga Bahasa UNSRI

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini melatih keterampilan mahasiswa dalam memahami teks bahasa Inggris yang meliputi pengetahuan tentang *tenses*, *vocabularies* dan *comprehension* baik dalam kalimat positif, negatif maupun kalimat tanya.

MATA KULIAH KEILMUAN DAN  
KETERAMPILAN (MKK) INTI

**Mata Kuliah : Pengantar Ilmu  
Hukum**

Kode : HUK-11108

Jumlah SKS : 4

Team Pengajar :

1. Rosmala Polani, SH., MH
2. Wahyu Ernarningsih, SH., M.Hum
3. Amir Syarifuddin, SH., M.Hum
4. Indah Febriani, SH., MH

**Deskripsi:**

Dalam bidang studi hukum, Pengantar Ilmu Hukum dinamakan "*Encyclopaedia Hukum*", yaitu bidang studi hukum yang merupakan pengantar (*introduction* atau *inleiding*) untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha/sebagai cara untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian penting hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum.

Sebagai pelajaran pengantar, merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum dalam kesatuan kurikulum yang diajarkan adalah sebagai Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), sehingga Pengantar Ilmu Hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar/pokok, baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum, menelaah hukum adalah sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia yang bersifat universal. Berdasarkan hal tersebut, dalam Pengantar Ilmu Hukum dipelajari semua seluk beluk mengenai hukum, antara lain mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam-macam bagian, sumber-sumber perkembangan/sejarah, fungsi-tugas, tujuan,

penyimpangan kaedah hukum, dan berbagai aspek perumusan dan perwujudannya dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan dan dikemukakan bahwa hakikat Pengantar Ilmu Hukum adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar dan kerangka pokok dari pengetahuan hukum yang menjadi dasar dan akar dari ilmu hukum itu sendiri.

**Mata Kuliah : Pengantar Hukum  
Indonesia**

Kode : HUK-11208

Jumlah SKS : 4

Team Pengajar :

1. Rosmala Polani, SH., MH
2. Wahyu Ernarningsih, SH., M.Hum
3. Amir Syarifuddin, SH., M.Hum
4. Indah Febriani, SH., MH

**Deskripsi:**

Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dulunya dinamakan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum di sini adalah terjemahan dari istilah "*recht as de*" (bahasa Belanda) yang berarti suatu susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa, yang saling berhubungan dan menentukan satu sama lain.

Tata Hukum suatu Negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh Negara. Dengan demikian yang dipelajari dalam mata kuliah Pengantar (Tata) Ilmu Hukum Indonesia adalah hukum yang ditetapkan oleh Negara/Pemerintah Indonesia yang disebut Hukum Positif Indonesia.

Pengantar Hukum Indonesia adalah mata kuliah dasar yang mempelajari keseluruhan hukum positif Indonesia, sebagai suatu sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia dalam garis besarnya (dasar-dasar, dan pengertian

pokoknya). Jadi objek dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia. Fungsi dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini adalah mengantarkan mahasiswa (setiap orang) yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia.

Pokok bahasan dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia merupakan contoh konkrit-aplikasi-penerapan dari pengetahuan yang dibahas dalam Pengantar Ilmu Hukum. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menjadi objek kajian-objek ilmu pengetahuan hukum.

**Mata Kuliah : Ilmu Negara**

Kode : HUK-11308

Jumlah SKS : 3

Team Pengajar :

1. Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
2. Zulhidayat, SH., MH

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang kedudukan dan status ilmu Negara dalam lingkup ilmu kenegaraan serta memberikan dasar pengetahuan untuk mempelajari Hukum Tata Negara.

**Mata Kuliah : Hukum Pidana**

Kode : HUK-11508

Jumlah SKS : 4

Team Pengajar :

1. H. M. Rasyid Ariman, SH., MH
2. Ruben Achmad, SH., MH
3. Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH

**Deskripsi:**

Hukum Pidana memuat sejarah hukum pidana, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan ketentuan-ketentuan umum KUHP. Sumber Hukum Pidana adalah Undang-undang, doktrine, yurisprudensi. Yang dipelajari dalam Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan umum, buku kesatu KUHP secara yuridis dan memuat doktrin dan yurisprudensi.

**Mata Kuliah : Hukum Dagang**

Kode : HUK-11608

Jumlah SKS : 3

Team Pengajar :

1. Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum
2. Dr. Muhammad Syarifuddin, SH. M.Hum
3. Antonius Suhadi AR, SH., MH
4. Arfiana Novera, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dasar Hukum Dagang, sejarah Hukum Dagang, bentuk-bentuk perusahaan dan asuransi

**Mata Kuliah : Hukum Tata Negara**

Kode : HUK-11708

Jumlah SKS : 4

Team Pengajar :

1. Dr. Febrian, SH., MS
2. Laurel Heydir, SH., MA
3. Iwan Kesumajaya, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang lembaga-lembaga Negara, tugas dan fungsinya, hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, hubungan antara lembaga Negara dengan warga Negara, serta hak dan kewajiban warga Negara.

**Mata Kuliah : Huk. Ketenagakerjaan**

Kode : HUK-11808

Jumlah SKS : 2

Pengajar :

H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Memberikan pengertian tentang tenaga kerja, sifat hukum ketenagakerjaan, pendapat para sarjana, ruang lingkup perjanjian kerja, perjanjian perburuhan (PKB), kesehatan kerja, keamanan atau keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan organisasi perburuhan internasional.

**Mata Kuliah : Metode Penelitian Hukum**

Kode : HUK-21208

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS
2. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa pengetahuan dalam bidang Penelitian Hukum. Pengajaran Metode Penelitian Hukum secara khusus membahas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Di samping itu, disampaikan pula ragam penelitian hukum doctrinal dan penelitian hukum non-doctrinal. Untuk mengantarkan mahasiswa dalam penulisan tugas akhir skripsi, topik tentang langkah-langkah penelitian mulai dari pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan serta teknik notasi ilmiah, akan menjadi bagian materi kuliah metode penelitian hukum.

**Mata Kuliah : Hukum Adat**

Kode : HUK-21308

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Albar Sentosa Subari, SH., SU
2. Hamonangan Albariansyah, SH., MH

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang Hukum Adat dalam system hukum di Indonesia, sifat, unsur-unsur Hukum Adat serta objek dari Hukum Adat.

**Mata Kuliah : Hukum Perdata**

Kode : HUK-21408

Jumlah SKS : 4

Team Pengajar :

1. Rosmala Polani, SH., MH
2. Prof. H. AS. Natabaya, SH., LL.M
3. H. Zukarnain Ibrahim, SH., M.Hum
4. Sri Turatmiyah, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya peraturan-peraturan hukum

yang mengatur hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok dalam kehidupan sosial, yang meliputi hukum tentang orang, hukum tentang benda, hukum perikatan dan pembuktian serta daluarsa.

**Mata Kuliah : Hukum Islam**

Kode : HUK-21508

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH
2. H. Abdullah Gofar, SH., MH
3. Rahmad Prayudi, SH

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang kerangka dasar ajaran Islam, pengetahuan tentang fiqh dan syariah, sumber-sumber Hukum Islam, asas-asas Hukum Islam, serta bagaimana kedudukan Hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia.

**Mata Kuliah : Hukum Agraria**

Kode : HUK-21708

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Dr. Happy Warsito, SH., MSc
2. Hj. Djasmaniar M, SH., MS
3. Irsan, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya memahami azas, filosofi dan pokok pikiran yang terkandung pada ketentuan dasar pokok-pokok agraria sebagai alasan dan titik tolak untuk mempelajari dan memahami pasal-pasal UUPA (UU No. 5 tahun 1960) serta menyelesaikan masalah-masalah pertanahan.

**Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara**

Kode : HUK-21808

Jumlah SKS : 4

Team Pengajar :

1. Saut Parulian Panjaitan, SH., M.Hum
2. Agus Ngadino, SH., MH
3. Iza Rumesten, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini meliputi hubungan negara hukum dan administrasi negara. Pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara, kedudukan hukum (*rechtspositie*) pemerintah, perihal wewenang pemerintah, tindakan/perbuatan administrasi negara, instrumen pemerintahan, ketetapan administrasi negara (*beschikking*), *feies ermessen*, hukum perencanaan, perizinan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, organisasi pemerintah pusat dan daerah, keuangan negara dan daerah, pengelolaan BUMN dan BUMD, kepegawaian pusat dan daerah, penegakan dan pertanggungjawaban hukum administrasi negara, pengawasan terhadap kegiatan administrasi negara, peradilan administrasi negara dan upaya administratif.

**Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana**

Kode : HUK-22208

Jumlah SKS : 3

Team Pengajar :

1. H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH
2. Elfira Taupani, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Hukum Acara Pidana sebagai suatu sistem maupun sebagai proses pada pokoknya merupakan masalah bagaimana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diproses melalui Peradilan Pidana. Yang dilakukan oleh sub sistem Kepolisian, Kejaksanaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai suatu proses, maka pelaksanaannya dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di pengadilan

dan terakhir pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

**Mata Kuliah : Hukum Acara Perdata**

Kode : HUK-22308

Jumlah SKS : 3

Team Pengajar :

1. H Abdullah Gofar, SH., M.Hum
2. Ahmaturrahman, SH

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang aspek-aspek yang dalam proses perkara perdata yang materinya meliputi Peristilahan, Pengertian, Sumber Hukum, Asas-asas, Susunan Badan *Peradilan*, Tugas Hakim, Sifat Acara, Sejarah Hukum Acara Perdata, Pemberian Kuasa, Gugatan, Sita Jaminan, Pemeriksaan di Persidangan, Pembuktian, Putusan Hakim (*Vonnis*), Upaya Hukum, dan Pelaksanaan Hakim (eksekusi).

**Mata Kuliah : Hukum Acara TUN**

Kode : HUK-22408

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Abdullah Gofar, SH., MH
2. Ahmaturrahman, SH

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang segala aspek hukum yang terdapat di dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara mulai dari awal proses pendahuluan sampai pelaksanaan putusan.

**Mata Kuliah : Hukum Perkawinan**

Kode : HUK-22508

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum
2. Putu Samawati, SH., M.Hum.

**Deskripsi:**

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-

Tuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya ikatan antara dua pribadi, tetapi ada-kalanya melibatkan pihak lain dan tidak jarang menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, sebagai seorang calon Sarjana Hukum sebaiknya mempunyai bekal pengetahuan tentang “hukum perkawinan” yang berlaku di Indonesia.

**Mata Kuliah : Hukum Internasional**

Kode : HUK-23108

Jumlah SKS : 4

Team Pengajar :

1. H. A. Romsan, SH., MH., LL.M
2. Usmawadi, SH., MH
3. Syahmin AK, SH., MH
4. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL
5. Meria Utama, SH., LL.M
6. Akhmad Idris, SH., MH

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar Hukum Internasional publik, antara lain: mengkaji sejarah dan perkembangan hukum internasional dan organisasi internasional serta eksistensi hukum internasional di dalam hukum nasional.

**Mata Kuliah : Hukum Lingkungan**

Kode : HUK-23208

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Azhar, SH., MSc., LL.M., LL.D
2. Dr. Febrian, SH., MS
3. Agus Ngadino, SH., MH
4. Hj. Mardiana, SH

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini meliputi hubungan pembangunan dan lingkungan hidup, landasan konstitusional dan dinamika legislasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengertian, asas dan ruang hukum lingkungan, tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengelolaan perizinan lingkungan, konservasi sumber daya alam, wewenang

pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu lingkungan, AMDAL, sengketa lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, *grand design* kebijakan lingkungan hidup dan antisipasi tantangan global.

**Mata Kuliah : Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Kode : HUK-31108

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
2. H. A. Romsan, SH., LL.M
3. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL

**Deskripsi:**

Hak azazi adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawa manusia sejak kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin oleh karena itu bersifat azazi dan universal. Dari sinilah berkembang pemikiran bahwa manusia harus memperoleh kesemoatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya dengan tidak mengabaikan kultur budaya dan norma-norma yang berlaku dimana ia hidup berbangsa dan bernegara.

MATA KULIAH KEILMUAN DAN  
KETERAMPILAN (MKK) INSTITUSIONAL

**Mata Kuliah : Hukum Keluarga dan  
Kewarisan Adat**

Kode : HUK-21608

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Albar Sentosa, SH., SU
2. Hamonangan Albariansyah, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat bersama dengan hukum positif lainnya yang sifatnya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan secara factual merupakan *the living law*. Delik adat adalah kaidah hukum yang turut mendasari pola hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat, fungsinya untuk menjaga keseimbangan hidup dan ketenteraman masyarakat.

**Mata Kuliah : Hukum Perikatan**

Kode : HUK-22008

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H Amrullah Arpan, SH., SU
2. Mohjan, SH., M.Hum
3. Hj. Yunial Laili M, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Hukum Perikatan merupakan bagian dari Hukum Perdata, yaitu Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang bersumber dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang berisi buku kesatu tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat tentang pembuktian dan kedaluarsaan.

Hukum Perikatan yang bersumber dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) berupa aturan-aturan (ketentuan) sebagai pedoman berisi hak dan kewajiban dalam hubungan orang dengan orang yang mempunyai kepentingan dalam ruang lingkup harta kekayaan.

**Mata Kuliah : Hukum Pidana Dalam  
Kodifikasi**

Kode : HUK-22108

Jumlah SKS : 2

Pengajar : H. M.Rasyid Ariman,SH.,MH

**Deskripsi:**

Mengajarkan hubungan hukum pidana umum dalam Buku I KUHP dengan Hukum Pidana Dalam Kodifikasi yang ditentukan dalam Buku II dan III KUHP. Berbagai bentuk kejahatan tertentu yang ditentukan dalam Buku II KUHP. Materi yang disampaikan adalah tindak pidana tertentu dalam KUHP, yang meliputi: sistematika tindak pidana yang terdapat dalam Buku II KUHP, unsur-unsur tindak pidana, penafsiran tindak pidana, analisis dengan pendekatan perbandingan terhadap materi yang dipelajari.

**Mata Kuliah : Hukum Tanah**

Kode : HUK-22808

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Dr. Happy Warsito, SH., MS
2. Hj. Djasmaniar M, SH., MS

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini memperluas pandangan dan pengetahuan mahasiswa tentang system hukum tanah yang didasarkan kepada berbagai konsepsi.

**Mata Kuliah : Hukum Pajak**

Kode : HUK-23008

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Achmad Tolip, SH., MH., M.AP
2. Putu Samawati, SH., MH
3. Iza Rumensten SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Hukum pajak adalah mata kuliah yang membahas dua pokok bahasan utama, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak materil. hukum pajak formal memuat bahasan tentang: pengertian pajak, fungsi pajak, hubungan hukum pajak dengan bidang hukum lainnya di indonesia, dasar-dasar pemungutan pajak, dasar pembenaran pemungutan pajak,

asas-asas pemungutan pajak, yurisdiksi pemungutan pajak, jenis pajak, menurut sifatnya, menurut cirinya, utang pajak, sifat utang pajak, timbulnya utang pajak, hapusnya utang pajak, ketentuan umum perpajakan, penagihan pajak dalam mekanisme *self assessment*, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan lelang, hak mendahului, pencegahan penagihan seketika dan sekaligus, penyanderaan, angsuran dan penundaan, pembayaran pajak, penghapusan piutang pajak, peradilan administrasi pajak, keberatan danbanding, pengadilan pajak, sanksi perpajakan, peranan sanksi, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun yang dibahas dalam hukum pajak materil sebagai berikut: pajak penghasilan (PPH), subjek dan objek pajak penghasilan, cara menghitung PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26, bagi hasil penerimaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN), pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPNBM) dan bea perolehan hak atas tanah (BPHTB), pajak dan retribusi provinsi dan kabupaten/kota, serta dibahas juga mengenai bea materai.

**Mata Kuliah : Sosiologi Hukum**

Kode : HUK-313208

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Azhar, SH., MSc., LL.M., LL.D
2. Amir Syarifuddin, SH., M.Hum
3. Indah Febriani, SH., MH

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi hukum di barat dan di Indonesia, teori-teori dan metode pada studi hukum dalam masyarakat yang tercermin dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana berfungsinya hukum dalam masyarakat serta hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang ilmu lainnya: seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

**MATA KULIAH KEILMUAN BERKARYA (MKB)**

**Mata Kuliah : Ilmu Ekonomi**

Kode : HUK-14008

Jumlah SKS : 2

Pengajar : Drs. M. Umar Nuh

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang ekonomi dan gejala-gejalanya, permintaan, penawaran *the law of diminishing return*, pendapatan nasional dan perilaku masyarakat dalam mempergunakan pendapatannya dan multiplier, *acceleration principle*, *inflationary*, pasar berjangka dan istilah-istilah dalam ekonomi.

**Mata Kuliah : Ilmu Politik**

Kode : HUK-14108

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.
2. Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H.
3. H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S.
4. Zulhidayat, S.H., M.H.
5. Mahesa Rannie, S.H., M.H.

**Deskripsi:**

Ilmu politik merupakan mata kuliah keahlian berkarya (MKB) dalam kurikulum fakultas hukum. Mata kuliah ilmu politik diberikan pada semester awal perkuliahan di samping ilmu negara sebagai bekal mahasiswa agar lebih mudah memahami mata kuliah lain yang berkaitan dengan ilmu negara dan ilmu politik seperti hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum administrasi negara.

Ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan yang utamanya mempelajari tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi. Kajian-kajian tersebut kemudian dalam mata kuliah ilmu politik dibagi dalam pokok-pokok bahasan perkuliahan antara lain sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya; konsep-konsep politik; berbagai



pendekatan dalam ilmu politik; demokrasi, undang-undang dasar; hak asasi manusia; pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal; badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; partisipasi politik; serta sistem pemilihan umum.

**Mata Kuliah : Ilmu Kedokteran  
Kehakiman**

Kode : HUK-24008

Jumlah SKS : 2

Pengajar :

H. Syarifuddin Pettanasse,SH,MH

**Deskripsi:**

Ilmu Kedokteran Kehakiman atau kedokteran forensik atau *forensic medicine*. Bagian dari kriminologi, atau kriminologi praktis yang bertujuan membantu Hukum Acara Pidana dalam mencari dan mendapatkan kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapannya, apakah telah terjadi tindak pidana sehubungan dengan itu, maka objek studi ilmu ini adalah menyangkut masalah kejahatan terhadap tubuh, nyawa dan luka.

**MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA  
(MPB)**

**Mata Kuliah : Skripsi**

Kode : HUK-49180

Jumlah SKS : 4

Team Pengajar : Dosen Pembimbing

**Deskripsi:**

Penulisan skripsi mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai dan merumuskan suatu masalah, menerapkan teori dan metode yang sesuai serta mengikuti tata cara sistematik, metodologi, terpadu dan jelas.

**MATA KULIAH BERKEHIDUPAN  
BERMASYARAKAT (MBB)**

**Mata Kuliah : Sosiologi**

Kode : HUK-17008

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Tri Agus Susanto, M.A.
2. Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.H.
3. Irsan, S.H., M.H.
4. Mahesa Rannie, S.H., M.H.

**Deskripsi:**

Sosiologi merupakan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) dalam kurikulum fakultas hukum. Mata kuliah sosiologi diberikan pada semester awal perkuliahan agar mahasiswa memahami bagaimana proses interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan hukum, maka interaksi sosial tersebut bisa menimbulkan hubungan hukum. Ini tentu saja sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mempelajari ilmu hukum pada semester berikutnya

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat karena objeknya adalah masyarakat. Kajiannya meliputi teori dan metodologi sosiologi, sosialisasi, interaksi sosial, lembaga sosial atau kemasyarakatan, kelompok sosial, tatanan sosial dan pengendalian sosial, stratifikasi sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan wewenang, serta berbagai masalah sosial.

MATA KULIAH PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PIDANA

**Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana**

Kode : HPA-38108

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. M. Rasyid Ariman, SH., MH

2. Elfira Taufani, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Perbandingan Hukum Pidana, memuat persamaan dan perbedaan sistem hukum, asas-asas hukum dan ketentuan-ketentuan umum hukum pidana beberapa negara di dunia. Yang dipelajari dalam Perbandingan Hukum Pidana adalah KUHP Indonesia, Korea, Philipina, Malaysia, Rusia dan China.

**Mata Kuliah : Hukum Pidana Khusus**

Kode : HPA-38208

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Malkian Elvani, SH, M.Hum

2. Nashriana, SH, M.Hum

3. Vera Novianti, SH, M.Hum

**Deskripsi:**

Salah satu pembagian Hukum Pidana adalah Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare atau ius speciale*). Mata kuliah ini membahas tentang Undang-Undang Pidana Khusus tersebut, dan merupakan pelengkap dari Hukum Pidana yang dikodifikasi dalam KUHP. Perkembangan tindak pidana khusus di Indonesia merupakan perkembangan tindak pidana dalam suatu masyarakat sedang mengalami modernisasi.

**Mata Kuliah : Kriminologi**

Kode : HPA-38308

Jumlah SKS : 2

Pengajar :

H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH

**Deskripsi:**

Kriminologi atau sering juga disebut sebagai sosiologi kriminalitas, pada

pokoknya membicarakan manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok yang melakukan penyimpangan (*deviance*) norma-norma hukum, sosial agama dan norma kebudayaan. Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka objek studi kriminologi adalah kejahatan, penjahat dan teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok dalam masyarakat melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti yang disebutkan di atas.

**Mata Kuliah : Hukum Pidana Anak**

Kode : HPA-38408

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Nashriana, SH., M.Hum

2. Vera Novianti, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Mata kuliah Hukum Pidana Anak pada pokoknya mebicarakan tentang perlindungan hukum anak dari perspektif hukum pidana materiel, hukum pidana formiel dan hukum pelaksanaan pidana anak berdasarkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam perlindungan hukum pidana materiel pada intinya berisikan tentang pengetahuan anak nakal dan sanksi yang disediakan baik dari sudut *stafshoort*, *stafmaat*, dan *stafmodusnya*. Perlindungan hukum anak dari perspektif hukum pidana formiel yang intinya berisikan tentang proses dan sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum anak dari perspektif pelaksanaan hukum pidana pada intinya berisikan bagaimana pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan oleh hakim.

**Mata Kuliah : Hukum Pidana Korporasi Perbankan**

Kode : HPA-38508

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Ruben Achmad, SH., MH

2. Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH

**Deskripsi:**

Korporasi dewasa ini telah dinyatakan

dalam perundang-undangan sebagai subyek hukum pidana. Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana pada dasarnya akibat motivasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga korporasi sering mengabaikan atau melanggar aturan hukum. Mekanisme meminta pertanggungjawaban pidana korporasi belum jelas pengaturannya dalam hukum pidana positif. Dengan demikian pemahaman melalui doktrin terhadap korporasi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Perbankan adalah salah satu korporasi yang dalam kegiatannya mengumpulkan, menyalurkan, dan menjual jasa kepada masyarakat sering kali terlibat dan menjadi korban kejahatan.

#### Pilihan

**Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum Pidana**

Kode : HPA-38808

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Ruben Achmad, SH., MH
2. Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH

#### **Deskripsi:**

Kapita Selektta Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan kumpulan aneka masalah-masalah hukum terpilih di bidang hukum pidana aneka masalah-masalah terpilih itu dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain dari sudut teoritik/dogmatik, dari sudut fungsional dan dari sudut politik hukum pidana serta dari sudut perbandingan, atau dari sudut masalah-masalah yang aktual dan kontekstual secara nasional maupun internasional.

**Mata Kuliah : Hukum Penitensier**

Kode : HPA-38908

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Nashriana, SH., M.Hum
2. H. M. Rasyid Ariman, SH., MH

#### **Deskripsi:**

Mata kuliah Hukum Penitensier pada pokoknya membicarakan tentang hukum pidana positif Indonesia yang berkaitan dengan *Stafstelsel* (Sistem/*Stelsel* Pidana) dan *Maatregelstelsel* (Sistim/*Stelsel* Tindakan). Pembicaraan tentang *Strafstelsel* dan *Maatregelstelse* berisikan tentang jenis-jenis sanksi, ukuran/pedoman penjatuhan sanksi dan pelaksanaan sanksi.

**Mata Kuliah : Viktimologi**

Kode : HPA-39008

Jumlah SKS : 2

Pengajar :

H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH

#### **Deskripsi:**

Viktimologi atau ilmu tentang korban, mengkaji masalah korban kejahatan, korban akibat lalu lintas dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka viktimologi mempelajari masalah-masalah apa itu korban, mengapa seseorang menjadi korban (viktimsiasi). Viktimsiasi struktural dan non struktural, peranan korban dalam tindak pidana, perlindungan hukum korban, hak dan kewajiban korban.

**Mata Kuliah : Hukum Pidana Politik**

Kode : HKP-404

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

Elfira Taupani, SH., M.Hum

#### **Deskripsi:**

Berisikan motif politik dalam tindak pidana politik, pengaturan tindak pidana politik dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sejarah hukum pidana politik di Indonesia. Kepentingan politik yang dapat menjadi objek tindak pidana politik dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang meliputi: tindak pidana terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, keutuhan wilayah NKRI, pemerintahan, dan seterusnya.

MATA KULIAH PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : **Hukum Persetujuan  
Khusus**

Kode : HPB-38108

Jumlah SKS : 3

Team Pengajar :

1. Mohjan, SH., MH
2. Sri Turatmiah, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Hukum Persetujuan Khusus merupakan bagian dari Hukum Perikatan yang bersumber dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Hukum Persetujuan Khusus yang bersumber dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) berupa atura-aturan (ketentuan) sebagai pedoman dalam membuat perjanjian, baik perjanjian mempunyai norma yang sudah diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun perjanjian tidak sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdato.

Mata Kuliah : **Hukum Penanaman  
Modal**

Kode : HPB-38308

Jumlah SKS : 3

Team Pengajar :

1. Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum
2. Iskandar Halim, SH., M.Hum
3. Sri Turatmiah, SH., M.Hum
4. Sri Handayani, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang: Hukum investasi dalam konteks perekonomian nasional, pemahaman dasar investasi langsung dan perspektif hukum kebijakan, anatomi investasi langsung di Indonesia, investasi Indonesia dari masa ke masa, ketentuan pokok yang mencerminkan upaya mendongkrak penanaman modal di Indonesia, aspek hukum tradisional penanaman modal, hukum dan kebijakan penanaman modal di beberapa negara ASEAN, penyelesaian kasus di bidang penanaman modal dan

implikasinya bagi iklim investasi di Indonesia, dan strategi pembenahan daya saing investasi langsung di Indonesia.

Mata Kuliah : **Hukum Jaminan**

Kode : HPB-38408

Jumlah SKS : 3

Team Pengajar :

1. H. Amrullah Arpan, SH., SU
2. Mohjan, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Hukum jaminan adalah bidang hukum yang berhubungan dengan lembaga yang berada dalam system Hukum Perdata. Objek jaminan berkaitan dengan Hukum benda, sedangkan praktek penjaminan (pemasangan hak jaminan) berkaitan dengan Hukum Perikatan sebagai perjanjian pokok. Perjanjian pokok biasanya dalam bentuk perjanjian kredit perbankan.

**Pilihan**

Mata Kuliah : **Hukum Waris BW**

Kode : HKP-412

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Amrullah Arpan, SH., SU
2. Ahmaturrahman, SH

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini membahas tentang Hukum Waris menurut BW Undang-undang (*Ab-Intestato*) maupun Waris Wasiat (*Testamen*) dan Hukum Harta Perkawinan, baik Perkawinan serta Cara Penyelesaian kasusnya masing-masing.

Mata Kuliah : **Hukum Jual Beli  
Perusahaan**

Kode : HKP-420

Jumlah SKS : 2

Pengajar :

1. Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum
2. Muhamad Rasyid, SH., M.Hum
3. Irsan, SH., M.Hum

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini berisikan tentang ruang lingkup Hukum Jual Beli

Perusahaan, Kekhususan-kekhususan Jual Beli Perusahaan serta Pengetahuan Praktik tentang Syarat-syarat Barang termasuk Tata Cara Pembayaran yang bersifat Internasional.

**Mata Kuliah : Hukum Kepailitan**

Kode : HKP-413

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

Pengajar :

1. Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum

2. Dr. M. Syaifuddin, SH., M.Hum

3. Putu Samawati, SH., MH

**Deskripsi:**

Mata kuliah ini ditawarkan bagi mahasiswa yang telah mengambil program kekhususan (PK) terutama PK Bisnis. Pokok bahasan mata kuliah ini mulai dari pengertian hukum kepailitan, dasar hukum kepailitan, sejarah singkat hukum kepailitan, para pihak yang terlibat proses kepailitan. Selain itu juga disampaikan materi tentang pengadilan niaga sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan kepailitan, dengan materi sebagai berikut: prinsip-prinsip hukum diperadilan niaga, kedudukan hukum acara dalam pengadilan niaga, permohonan pailit, penyampaian permohonan oleh panitera kepada ketua pengadilan niaga, penetapan hari sidang oleh pengadilan niaga, pemanggilan sidang pertama, pelaksanaan sidang, penundaan sidang, putusan permohonan pailit, akibat yuridis dengan model pemberlakuan demi hukum (*by the operation of law*), model pemberlakuan secara *rule of reason*. Dalam materi hukum kepailitan juga dibahas tentang perangkat dari pengadilan niaga yang berupa curator dan hakim pengawas, dengan rincian pokok bahasan sebagai berikut: yang dapat menjadi kurator, kedudukan kurator, perincian kewenangan, tugas dan hak kurator, tata cara tugas kurator, kurator menjual hak pailit, persetujuan pihak tertentu atas tindakan kurator, yang

dapat menjadi hakim pengawas, kedudukan hakim pengawas, perincian kewenangan, tugas dan hak hakim pengawas, tata cara tugas hakim pengawas, kapan saat dinyatakan pailit, mekanisme *stay*, *action paulina*, pihak-pihak yang melakukan pemberesan harta pailit, prosedur pembagian harta pailit kepada kreditur dan juga dibahas mengenai mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

**Mata Kuliah : Hukum Pasar Modal**

Kode : HKP-422

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

Pengajar :

1. Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum

2. Putu Samawati, SH., MH

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan program kekhususan Hukum Perdata, yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah tentang hakikat pasar modal, peranan pasar modal bagi pembangunan, sumber hukum pasar modal, sejarah perkembangan pasar modal dunia dan Indonesia, persoalan-persoalan tentang kebijakan hukum dalam pasar modal, struktur kelembagaan pasar modal, badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, bursa efek Indonesia, perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, emiten, perusahaan publik dan reksa dana, investor, lembaga penunjang pasar modal, instrument pasar modal yang berupa instrument saham, instrument utang (*obligasi*), dibahas tentang aspek hukum *go public* dan penawaran umum (*public offering*). Dibahas juga tentang mekanisme perdagangan efek pada pasar perdana dan pasar sekunder. Bahasan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentang benturan kepentingan pada transaksi tertentu, yang berupa sub bahasan: pengertian dan ruang lingkup benturan kepentingan pada transaksi

tertentu, perlindungan hukum terhadap pemegang saham, tanggung jawab perseroan dan pengurus atas benturan kepentingan transaksi tertentu, sanksi atas pelanggaran pada benturan kepentingan kepentingan transaksi tertentu. Selain itu juga dibahas tentang pelanggaran dan kejahatan dibidang pasar modal, yang berupa: pelanggaran di bidang pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal, kewenangan Bapepam-LK dalam penegakan hukum, sistem sanksi.

**Mata Kuliah : Hukum Asuransi**

Kode : HKP-423

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Muhamad Rasyid, SH., M.Hum
2. Vegitya Ramadhani-Putri, SH., S.Ant

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini membahas materi-materi yang berkaitan dengan Ketentuan Hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Perjanjian tentang Asuransi. Selain itu juga berisi tentang Prinsip-prinsip dalam penutupan Asuransi, Hak dan Kewajiban para pihak serta cara penyelesaian sehubungan dengan terjadinya Kerugian dalam Arusansi.

**MATA KULIAH PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ISLAM**

**Mata Kuliah : Hibah dan Wasiat**

Kode : HPC-38308

Jumlah SKS : 2

Pengajar : Ahmaturrahman, SH

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini membahas tentang Hibah dan Wasiat menurut syariat Islam yang materinya meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat-syarat dan Macam-macam Hibah serta Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat-syarat, dan Batalnya Wasiat.

**Pilihan**

**Mata Kuliah : Hukum Asuransi Islam**

Kode : KPC -433

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

- 1.H. Abdullah Gofar, SH., MH
2. Muhamad Rasyid, SH., M.Hum

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini membahas materi-materi yang berkaitan dengan Ketentuan Hukum yang terdapat dalam Syariah Islam, Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Perjanjian tentang Asuransi. Selain itu juga berisi tentang Prinsip-prinsip dalam penutupan Asuransi, Hak dan Kewajiban para pihak serta cara penyelesaian sehubungan dengan terjadinya kerugian dalam arusansi syariah.

**MATA KULIAH PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum Tata Negara (HTN)**

Kode : HPD-38108

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS
2. Abunawar Basyeban, SH

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini secara khusus membahas isu-isu aktual dalam praktek ketatanegaraan. Oleh karenanya materi perkuliahan disesuaikan dengan isu-isu ketatanegaraan yang sedang berlangsung. Perkuliahan dilakukan dengan sistem *focus group discussion*. Pada setiap pertemuan, mahasiswa secara bergilir melontarkan isu ketatanegaraan. Pengajar bertindak sebagai fasilitator untuk memantau proses diskusi. Kemudian berangkat dari persoalan-persoalan yang muncul dalam diskusi, fasilitator menjelaskan aspek-aspek teoritik dan bersama seluruh peserta membuat kesimpulan terhadap topik diskusi.

**Mata Kuliah : Sistem Politik di Ind.**

Kode : HPD-38208

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS

2. Laurel Heydir, SH., MA

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa pengetahuan tentang kehidupan politik ketatanegaraan yang diterapkan di Indonesia, baik dari sudut pandang sistem hukum ketatanegaraan maupun sudut pandang teori dan praktek politik ketatanegaraan. Secara khusus materi perkuliahan mengarah pada infra struktur politik ketatanegaraan dan supra struktur ketatanegaraan.

**MATA KULIAH PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL**

**Mata Kuliah : Hukum Laut Inter.**

Kode : HPE-38108

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Usmawadi, SH., MH

2. Mada Apriandi Zuhir, SH.,MCL

3. Akhmad Idris, SH., MH

**Deskripsi :**

Perkembangan Hukum Laut Internasional sampai Konvensi Hukum Laut 1982, materi konvensi-konvensi Hukum Laut Jenewa 1958/1960 dan konvensi-konvensi hukum laut baru serta peran Indonesia dalam bidang pengaturan Hukum Laut Internasional, khususnya dalam perkembangan konsep Negara Kepulauan (*Archipelagic State*)

**Mata Kuliah : Hukum Perjanjian Internasional**

Kode : HPE-38208

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Syahmin AK, SH., MH

2. Akhmad Idris SH., MH

**Deskripsi :**

Perkembangan yang terjadi pada

tataran Nasional maupun Internasional menuntut kita melakukan penyesuaian, termasuk merubah paradigma berbangsa dan bernegara ke arah sistem pemerintah yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel dengan member ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi terwujudnya tujuan nasional dalam kerangka NKRI.

Sebagai Negara yang aktif dalam pergaulan internasional, pemerintah Indonesia telah mengadakan lebih dari 2500 perjanjian internasional dengan pihak asing, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral, yang proses pembuatannya dalam banyak hal sudah mulai seragam berkat telah diterbitkannya dua buah Undang-undang, yaitu UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan UU No.24/2000 tentang Perjanjian Internasional.

Penyajian materi kuliah (*course materials*) Hukum Perjanjian Internasional pada tataran Pendidikan Strata 1 dimulai dari: Istilah dan Pengertian Perjanjian, ruang lingkup, bentuk dan klasifikasi perjanjian internasional; Prosedur pembuatan perjanjian internasional; Mulai berlaku dan berakhirnya perjanjian; Masalah ratifikasi dan reservasi perjanjian; Amandemen dan modifikasi perjanjian; Akibat-akibat hukum perjanjian; Penafsiran Perjanjian, dan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Perjanjian internasional.

**Mata Kuliah : Hukum Diplomatik dan Konsuler**

Kode : HPE-38308

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Syahmin AK, SH., MH

2. Meria Utama, SH., LL.M

**Deskripsi :**

Secara normatif dan empiris mengenai Hukum Diplomatik dan Konsuler pada era

Global dewasa ini dituntut adanya '**reaksi yuridis**' yang memadai agar secara damai berdasarkan prinsip kesetaraan.

Dalam rangka menuju tatanan masyarakat dunia yang teratur, kehadiran Hukum Diplomatik dan Konsuler sangat penting terutama dalam mengatur dan memecahkan permasalahan hubungan antar negara dan organisasi internasional. Oleh karena itu fungsi perwakilan diplomatik sangat penting bagi Negara dan masyarakat internasional.

Hukum Diplomatik dan Konsuler pada tataran Pendidikan Strata 1 ini menyajikan materi kuliah (*course materials*) dimulai dari: Istilah dan Pengertian, ruang lingkup dan sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik dan Konsuler; Sumber Hukum Diplomatik; Pembukaan dan Pemutusan Hubungan Diplomatik; Hubungan Diplomatik dan Konsuler; Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik; Masalah Keprotokolan dan Kekonsuleran; dan Praktek Indonesia dalam melakukan Hubungan Luar Negeri.

**Mata Kuliah : Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional**

Kode : HPE-38508

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Usmawadi, SH., MH
2. Syahmin AK, SH., MH

**Deskripsi :**

Perkembangan sering terjadi pada tataran Internasional memperlihatkan bahwa sengketa-sengketa yang terjadi dalam hukum publik pada awalnya banyak diselesaikan melalui cara kekerasan. Oleh sebab itu dalam Piagam PBB ditentukan ada kewajiban bagi anggotanya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka melalui cara-cara damai. Sengketa antar subjek hukum internasional, khususnya antar negara diselesaikan melalui mekanisme damai, yakni melalui negosiasi, jasa baik dan

mediasi, konsiliasi, arbitrase dan lembaga peradilan. Cara-cara kekerasan seperti tindakan balasan (*reprisal* dan *restorsi*), intervensi, blockade dan perang hanya merupakan pilihan terakhir, setelah cara-cara damai tidak memungkinkan untuk digunakan lagi.

Sengketa wilayah perairan lahir mekanisme khusus seperti diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 beserta tindak lanjutnya.

Dalam lapangan hukum privat internasional, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lebih disukai oleh para pelaku bisnis. Oleh karena itu, kajian tentang lembaga arbitrase internasional dan nasional serta lembaga mediasi dalam bisnis internasional merupakan pokok bahasan tambahan dalam mata kuliah ini.

**Pilihan :**

**Mata Kuliah : Hukum Udara & Ruang Angkasa**

Kode : HPE-39308

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Syahmin AK, SH., MH
2. H. A. Romsan, SH., MH., LL.M

**Deskripsi :**

Sejarah dunia mencatat betapa banyaknya usaha yang telah dilakukan manusia dalam upaya memenuhi hasratnya untuk melakukan penerbangan. Mulai dari **Leonardo da Vinci** yang pertama kali mempersoalkan kemampuan terbang secara ilmiah, **Blanchard dan Jeffries** yang berhasil terbang menyeberangi selat Dover, dan **Henri Farman** yang berhasil terbang dengan menggunakan semacam pesawat udara tipe pesawat terbang. Sampai akhirnya pada 4 Oktober 1957 **Uni Soviet** berhasil meluncurkan **Sputniknya** mengorbit mengelilingi bumi. Hasil spektakuler dari usaha tersebut adalah berhasilnya manusia melakukan penerbangan dengan



roket menjelajah ruang angkasa dan melakukan pendaratan di bulan.

Bagaimana hal rumit tersebut dipecahkan dan diatur agar tak saling merugikan banyak pihak, serta bagaimana kedudukan Negara kita dalam percaturan ruang angkasa, dibahas dalam mata kuliah Hukum Udara dan Ruang Angkasa yang berbobot 2 sks. Namun secara rinci **Course Materials** ini dimulai dari: Hukum Udara; Regime Udara, dan Pesawat Udara menurut Konvensi Paris 1919; Konvensi Chicago 1944 tentang ICAO Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; Status Hukum Ruang Udara; Wilayah Udara Nasional; Masalah Delimitasi dan Ruang Udara Internasional; Regime Hukum Navigasi Udara; Hukum Angkasa Luar; Status Hukum Angkasa Luar dan Geostationary Orbit; Pengaturan Kegiatan di Angkasa Luar; Mekanisme Kelembagaan Kerjasama; Kepentingan Indonesia Atas Ruang Angkasa; yang terakhir dengan studi tentang Orbit Geostationary Orbit (GSO) dari segi Kepentingan Pembangunan Nasional Indonesia.

MATA KULIAH PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**Mata Kuliah : Hukum Pemerintahan Daerah**

Kode : HPF-38108

Jumlah SKS : 2

Pengajar :

Hj. Helmanida, SH., M.Hum

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini meliputi konsep negara kesatuan dan federal, otonomi daerah dalam negara kesatuan, pengertian dan ruang lingkup hukum pemerintahan daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan legislasi tentang pemerintah-an daerah, aspek hubungan antara pusat dan daerah, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, organisasi pemerintahan daerah,

kewenangan kepala daerah, kewenangan DPRD, produk hukum daerah, pemilihan kepala daerah.

**Mata Kuliah : Hukum Keuangan Negara**

Kode : HPF-38208

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar : -

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini meliputi pengertian dan ruang lingkup hukum keuangan negara, perkembangan landasan hukum keuangan negara, pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan negara, pengembalian kerugian negara di luar pengadilan, pengembalian kerugian negara melalui peradilan, anggaran negara, tahapan dan proses anggaran negara, pertanggungjawaban keuangan negara, lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan negara, badan layanan umum.

**Mata Kuliah : Hukum Tata Ruang dan Perizinan**

Kode : HPF-38308

Jumlah SKS : 2

Pengajar : H. Amrullah Arpan, S.H., SU.

**Deskripsi :**

Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang: hukum perencanaan, asas keterpaduan pengelolaan tata ruang, tujuan penataan ruang, strategi dan manfaat penataan tata ruang, aspek hukum administrasi negara dalam penataan ruang, aspek hukum administrasi negara dalam perizinan, dimensi hukum tanggung jawab negara terhadap lingkungan dan alam, analisis mengenai dampak lingkungan, pengelolaan perizinan lingkungan, mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, mekanisme upaya administratif di bidang tata ruang dan perizinan.

**Mata Kuliah : Hukum Kepegawaian**

Kode : HPF-38408

Jumlah SKS : 2

Pengajar :

Saut P. Panjaitan, SH., M.Hum

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini meliputi sejarah perkembangan pegawai negeri, ruang lingkup pengertian negeri sipil, sistem pembinaan PNS, hak dan kewajiban PNS, pegawai pusat dan pegawai daerah, netralitas PNS, jenis dan kedudukan PNS, manajemen PNS, badan kepegawaian, sengketa kepegawaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, penyidik PNS di lingkungan pemerintahan daerah, kenaikan pangkat PNS, reformasi kepegawaian.

**Mata Kuliah : Asas-asas Umum Pemerintahan yg Baik**

Kode : HPF-38508

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Saut P. Panjaitan, SH., M.Hum

2. Ridwan, SH., M.Hum

3. Iza Rumesten, SH., MH

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini meliputi pengertian dan ruang lingkup asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih (*clean government*), peran AAUPB dalam kajian hukum administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai hukum positif dan kenyataan dalam praktek, wujud peran asas-asas umum pemerintahan yang baik, perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam yurisprudensi, manfaat asas-asas umum pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), implementasi asas-asas umum dalam pemerintahan daerah.

**Pilihan :**

**Mata Kuliah : Perbuatan Melanggar Hk. Oleh Penguasaan**

Kode : HPF-38608

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. H. Amrullah Arpan, SH., SU

2. Rosmala Polani, SH., MH

3. Hj. Mardiana, SH

**Deskripsi :**

Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang: kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat, asas legalitas dan wewenang pemerintah, sumber dan cara karakteristik tindakan materil hukum pemerintah, instrument pemerintah, dan peraturan kebijakan, tanggung jawab publik, karakter hukum dari *onrecht matige overheidsdaad*.

**Mata Kuliah : Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara**

Kode : HPF-38708

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar : -

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini meliputi pengertian dan ruang lingkup HAN, penguatan peran negara, perihal wewenang pemerintah, tindak administrasi negara, ketetapan administrasi negara, *fries ermessen*, sistem perizinan, pengawasan terhadap administrasi negara, peradilan administrasi negara, *good governance*, *reinventing government*, desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan pelayanan publik dalam negara kesejahteraan, konsep dan arah kebijakan pelayanan publik di daerah, pertanggungjawaban keuangan.

**Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum Agraria**

Kode : HPF-38808

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Dr. Happy Warsito, SH., MSc
2. Hj. Djasmaniar M, SH., MS

**Deskripsi :**

Dalam mata ini dipelajari tentang: Konstruksi Pasal 33 UUD 1945, pengertian dan ruang lingkup hukum agraria, hukum tanah sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah nasional, ketentuan pokok hak-hak penguasaan atas tanah, hak-hak perorangan dan kebijakan hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak tanggungan atas tanah, *landreform* di Indonesia, dan tata guna tanah.

**Mata Kuliah : Hukum Tanah dan Perizinan Perkb.**

Kode : HPF-39108

Jumlah SKS : 2

Pengajar :

Dr. Happy Warsito, SH., MSc

**Deskripsi :**

Dalam mata ini dipelajari tentang: Penggunaan hak-hak atas tanah, penataan kelembagaan pertanahan, aspek hukum administrasi negara dalam pengelolaan tanah dan perkebunan, dimensi hukum tanggung jawab negara terhadap lingkungan dan alam kebijakan hukum pertanahan, aspek hukum konsolidasi tanah, unsru, bentuk dan isi perizinan penggunaan tanah untuk perkebunan, kaedah hukum penggunaan tanah untuk perkebunan, aspek hukum pemilikan tanah perkebunan oleh warga negara asing, peranan penanaman modal asing di bidang perkebunan Indonesia dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

**Mata Kuliah : Kapita Bangunan dan Apartemen**

Kode : HPF-38908

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Dr. Happy Warsito, SH., MSc

2. Hj. Djasmaniar M, SH., MS

3. Hj. Mardiana, SH

**Deskripsi:**

Dalam mata ini dipelajari tentang: Aspek hukum publik (hukum administrasi) pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan bangunan dan apartemen, akibat hukum, serta keterkaitannya dengan aspek pengaturan hukum lainnya.

**Mata Kuliah : Hukum Kearsipan & Kebebasan Memperoleh Infor.**

Kode : HPF-39008

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Dr. Febrian, SH.,M.Hum
2. Agus Ngadino, S.H.,M.Hum

**Deskripsi :**

Dalam mata ini dipelajari tentang: Perlindungan hak konstitusional setiap orang untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, kewajiban badan publik untuk membangun sistem dokumentasi dan layanan informasi, pelibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan publik, batasan mengenai informasi publik yang tidak boleh diakses, komisi informasi publik, penyelesaian sengketa informasi publik serta pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik seperti dengan terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

**Mata Kuliah : Hukum Peradilan Pajak**

Kode : HPF-39208

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Achmad Tolip, S.H.
2. Putu Samawati, S.H., M.Hum.

**Deskripsi :**

Dalam mata ini dipelajari tentang: Pengertian tindak pidana pajak, penetapan dan ketetapan pajak, mekanisme penagihan pajak, penyidikan tindak pidana pajak, penuntutan tindak pidana pajak, prosedur pengajuan

keberatan dan banding, pembukuan dan pemeriksaan pajak, ketentuan khusus perpajakan, ketentuan pidana perpajakan dan kepustakaan pengadilan dan upaya hukumnya.

**Mata Kuliah : Hukum Pengelolaan BUMN/BUMD**

Kode : HPF-39408  
Jumlah SKS : 2  
Pengajar : Ridwan, SH., M.Hum

**Deskripsi :**

Dalam mata ini dipelajari tentang: Fungsi negara kesejahteraan, kedudukan hukum (legal status) BUMN/BUMD, proses dan tata cara pemisahan kekayaan negara/daerah untuk modal usaha, sistem pertanggungjawaban pengelolaan modal negara/daerah dalam BUMN/BUMD, perspektif keniscayaan BUMN/BUMD dalam konteks Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, dan sebagainya.

**Mata Kuliah : Hukum Tentang Potensi Pajak dan Retribusi Daerah**

Kode : HPF-39608  
Jumlah SKS : 2  
Team Pengajar :

1. Achmad Tolip, S.H.
2. Putu Samawati, S.H., M.Hum.
3. Agus Ngadino, SH.,M.Hum

**Deskripsi :**

Dalam mata ini dipelajari tentang: Pengertian pajak daerah dan retribusi daerah, desentralisasi fiskal dan kapasitas fiskal pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana perimbangan (DAU dan DAK), jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah, jenis pajak daerah dan cara menghitungnya, retribusi daerah, pendapatan asli daerah sebagai cerminan pertumbuhan ekonomis daerah.

**Mata Kuliah : Hukum Industri**

Kode : HPF-39508  
Jumlah SKS : 2  
Team Pengajar :

1. Dr. Happy Warsito, SH., MSc
2. Agus Ngadino, SH., MH

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini meliputi potret masalah perindustrian dan konsep pembangunan industri, pengertian dan ruang lingkup hukum industri, prinsip dan tujuan pembangunan industri, pengaturan dan pengembangan industri, perizinan usaha industri, pemilihan dan pengalihan teknologi industri, perlindungan hukum desain produk industri, rancang bangun dan perekayasa-an industri, standarisasi bahan baku dan hasil industri, wilayah industri dan konsep kawasan industri, industri dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyerahan kewenangan dan urusan tentang industri, sistem produksi berdasarkan ekonomi global dankarakter lokal, tanggung jawab negara dalam *resource-based* industri.

**Mata Kuliah : Huk. Perb. Negara**

Kode : HPF-342  
Jumlah SKS : 2  
Team Pengajar :

1. Saut P. Panjaitan, SH., M.Hum
2. Agus Ngadino, SH., MH

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini meliputi pengertian dan ruang lingkup hukum perbendaharaan negara, perkembangan lansadan hukum perbendaharaan negara, asas-asas umum perbendaharaan negara, pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik negara/daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggung jawaban APBN/APBD, penyelesaian kerugian negara, pengelolaan keuangan badan layanan umum.

**Mata Kuliah : Hukum Administrasi  
Pembangunan**

Kode : HPF-341

Jumlah SKS : 2

Team Pengajar :

1. Hj. Helmanida, SH., M.Hum

2. Ridwan, SH., M.Hum

3. Iza Rumesten, SH., M.Hum

**Deskripsi :**

Mata kuliah ini meliputi pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi pembangunan, perkembangan hukum administrasi pembangunan, fungsi dan perkembangan hukum administrasi dalam pembangunan nasional, ciri-ciri administrasi pembangunan, kegiatan dan pelaksanaan administrasi pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, program pembangunan nasional, administrasi pembangunan daerah, reinventing pembangunan.